

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, maka telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 – 2022.

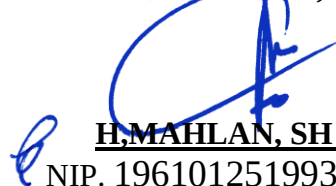
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 050/2020/sj tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM serta RENSTRA SKPD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk memberi arah yang lebih konkrit dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menjamin konsistensi, komitmen dan memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, semoga dokumen Rencana Strategis ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangakalan Bun, Agustus 2019

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Sekretaris,


H. MAHLAN, SH M.Si
NIP. 196101251993031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	7
2.2. Sumber Daya SKPD	11
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Pelayanan SKPD	20
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	22
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	22
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	22
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	24
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	24

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
	5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD	27
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	
	6.1. Program dan Kegiatan	30
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
BAB VIII	PENUTUP	46
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah sebuah dokumen perencanaan yang memiliki periode 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tahun 2017-2022 ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan amanat Pasal 272 Undang-undang 23 Tahun 2014 bahwa perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan. Hal ini mengamanatkan bahwa penyusunan renstra di Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman pada Perbup Nomor : 9 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu perangkat daerah di Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjalankan tugas pembangunan di bidang kesekretariatan . Sesuai amanat Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu SKPD yang bersifat supporting staf mempunyai tugas Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penyediaan serta

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. atau dengan kata lain Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat bukan lembaga politik melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjalankan fungsi pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan idiil penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan untuk landasan operasionalnya meliputi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Perda Nomor 10 Tahun 2006 tentang RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 – 2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Kerja SKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka kegiatan, rencana kerja dan pendanaan berdasarkan wilayah dan fungsi, serta ringkasan pendanaan yang memuat rincian urusan, program dan kegiatan yang pendanaannya dipilah menurut sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Dana Alokasi Khusus serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 mempunyai maksud untuk memberikan arah bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJMD Kab Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD
2. Memberikan instrumen pengukuran kinerja pelayanan SKPD
3. Sebagai acuan dalam penyusunan LAKIP SKPD
4. Sebagai dasar/acuan SKPD untuk menjalankan program kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2022 ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi/Kabupaten

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 44 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Bagian Umum, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian Humas dan Protokoler
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
3. Bagian Keuangan, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
 - b. Sub Bagian Akutansi, Pelaporan dan Perbendaharaan
4. Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang-Undangan, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Alat kelengkapan Dewan
 - b. Sub Bagian Hukum, Perundang – Undangan dan Aspirasi
5. Kelompok jabatan fungsional dan tenaga ahli
 - a. Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tersaji dalam gambar 2.2.
 - b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan jabatan struktural eselon II.b
 - c. Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a
 - d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a

Tugas Pokok Dan Fungsi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dalam hal ini memegang peran yang sangat sentral dan strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena pada hakekatnya seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang ada sesuai ketentuan yang berlaku pasti memerlukan fasilitasi dari unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Untuk itu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senantiasa berusaha melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam arti mampu memberikan dukungan pelayanan yang baik utamanya dalam rangka terwujudnya visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dikembangkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara berkelanjutan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 44 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka tugas pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah :

“ Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penyediaan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ”.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

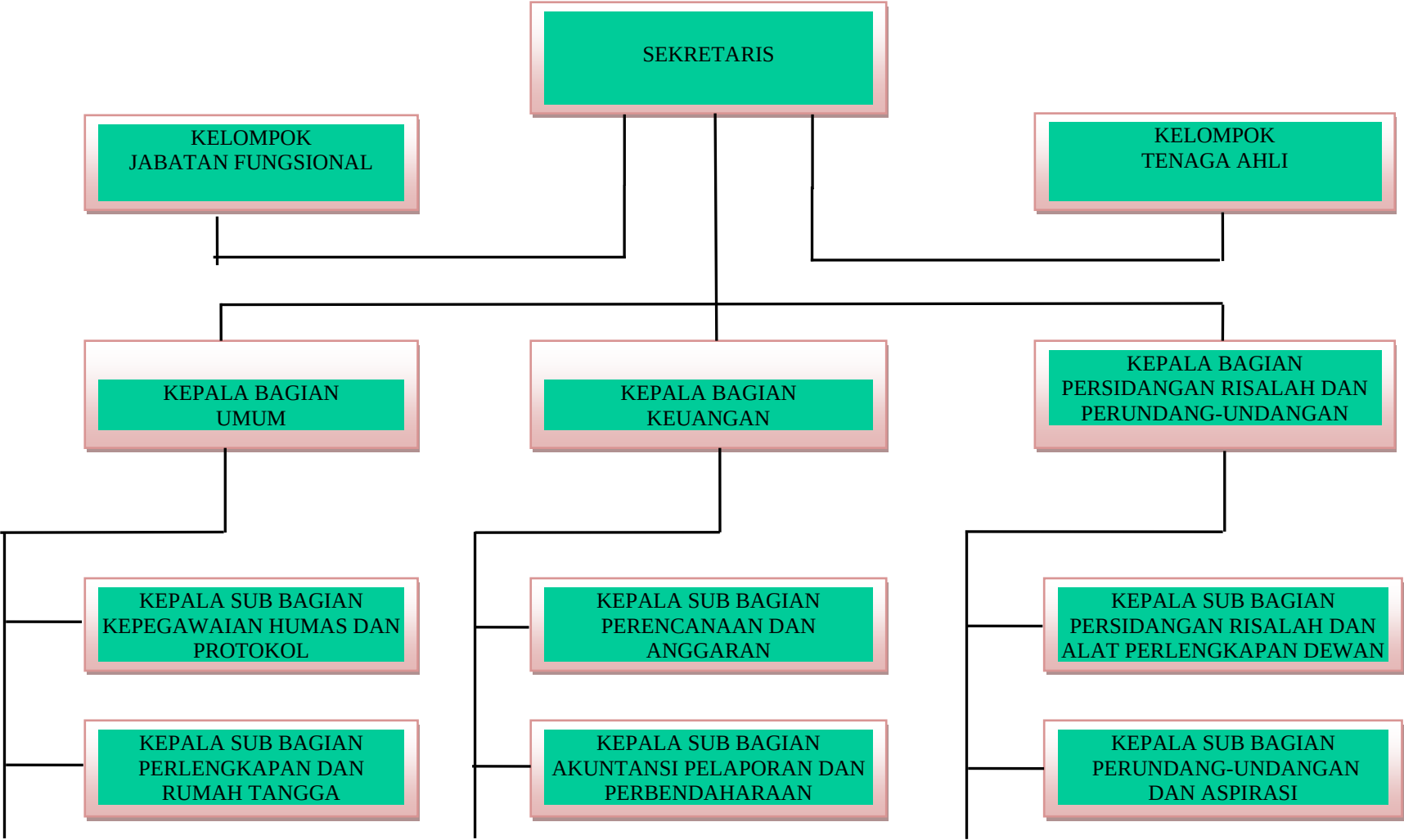
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Penyelenggaraan rapat - rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
5. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Fasilitas rapat-rapat dan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Menyusun dan membuat risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Melakukan pembinaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan serta analisis jabatan.
5. Penyelenggaraan urusan rumah tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Menyelenggarakan dokumentasi, pelayanan informasi dan perpustakaan.
7. Pengelolaan administrasi produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Berdasarkan Perda No.44 Tahun 2016



2.2 Sumber Daya SKPD

Sampai akhir tahun 2016, di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki Pegawai sebanyak 47 orang, dengan rincian sebagaimana terlampir di bawah.

a. Data pegawai negeri sipil menurut pendidikan :

No	Uraian	Akhir tahun 2016
1	S2	2
2	S1	8
3	Sarjana Muda	9
4	SLTA	6
5	SLTP	0
6	SD	1
	Jumlah	26

b. Data pegawai negeri sipil menurut pangkat dan golongan :

No	Uraian	Akhir tahun 2016
1.	Golongan I/a	-
	Golongan I/b	-
	Golongan I/c	-
	Golongan I/d	-
	Jumlah Gol I	-
2.	Pengatur Muda (II/a)	1
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	
	Pengatur (II/c)	3
	Pengatur Tk. I (II/d)	9
	Jumlah Gol II	13
3.	Penata Muda (III/a)	1
	Penata Muda Tk.I (III/b)	2
	Penata (III/c)	3
	Penata Tk.I (III/d)	3
	Jumlah Gol III	9
4.	Pembina (IV/a)	-
	Pembina Tingkat I (IV/b)	3
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Jumlah Gol IV	4

c. Data pegawai negeri sipil menurut eselon :

No	Uraian	Akhir tahun 2016
	Eselon I	-
	Eselon IIb	1
	Eselon IIIb	-
	Eselon IIIa	3
	Eselon IVa	6
	Fungsional	-
	Staf	16
	Jumlah	26

d. Data pegawai tidak tetap (honorar) :

No.	Uraian	Jumlah
1	Tenaga Kontrak Daerah	15

2	Tenaga Ahli Fraksi	6
	Jumlah	21

Kondisi Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan akhir tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis>Nama Barang	Merk/Tahun Pembuatan	Jumlah		Harga Sat (Rp.)	Kondisi
			Vol	Sat		
1	2	3	4	5	6	7
I	Tanah & Bangunan					
1.	Tanah Bangunan Kantor Gedung Kantor DPRD	Jl.HM.Rafi,i	31.095	M ²	932.900.000	
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl.HM.Rafi,i			4.866.472.500	
3.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain			M ²	22.000.000	
4.	Bangunan Gedung Lain-lain			M ²	191.478.750	
5.	Bangunan Gedung Kantor tertutup Permanen			M ²	146.305.556	
6.	Bangunan Gedung tempat ibadah permanen			M ²	88.745.000	
7.	Bangunan Gedung tempat pertemuan permanen			M ²	627.389.525	
8.	Gedung Pos jaga Semi Permanen		24,00	M ²	5.000.000	
9.	Gedung garasi/Pool Semi Permanen		81.00	M ²	84.400.000	
10.	Bangunan lain-lain			M ²	728.949.550	
11.	Rumah Negara Gol III Type B semi Permanen		36.00	M ²	55.700.000	
12.	Rumah Negara Gol III Type C semi Permanen			M ²	44.920.000	
II	Perlengkapan Gedung Kantor					
1.	Mesin ketik manual longewagen (18)		2	Buah	10.000.000	
2.	Calculator		5	Buah	2.000.000	
3.	Mesin Foto Copy		2	Unit	74.500.000	
4.	Rak kayu		10	Buah	49.000.000	
5.	Filing Besi/Metal		2	Unit	3.200.000	
6.	Brand Kas		1	Unit	9.000.000	
7.	Lemari kaca		18	Unit	62.463.500	
8.	Alat Pengahncur kertas		1	Buah	2.250.000	
9.	Papan Pengumuman		1	Buah	1.000.000	
10.	Alat kantor lainnya		38	Buah	18.500.000	

11	Mesin pompa air		5	Set	11.000.000	
12	Lemari Kayu		22	Buah	28.935.000	
13	Meja kayu/rotan		2	Buah	1.550.000	
14	Kursi besi/Metal		10	Buah	19.500.000	
15	Kursi kayu/rotan/bambu		7	Buah	3.630.000	
16	Meja rapat		81	Buah	216.870.000	
17	Meja makan		2	Buah	6.600.000	
18	Kursi rapat		72	Buah	186.120.000	
19	Kursi tamu		11	Buah	27.750.000	
20	Kursi putar		30	Buah	19.515.000	
21	Kursi lipat		500		87.000.000	
22	Meja biro		12		12.600.000	
23	Sofa		9	Unit	62.100.000	
24	Lemari pakaian		2	Unit	5.000.000	
25	Meubel lainnya		5	Unit	31.344.000	
26	Tempat tidur busa		2	Unit	8.000.000	
22	Kursi kerja		78		91.225.000	
23	Gordyn		8	Buah	268.712.625	
24	Jam mekanis		4	Buah	31.500.000	
25	Mesin Potong Rumpuk		5	Unit	19.940.000	
26	Mesin cuci		2		4.700.000	
27	Lemari es		11		35.100.000	
28	AC unit		38		445.806.250	
29	AC Split		13		61.200.000	
30	Exhause fan		18		50.024.750	
31	Kompor Gas		1		500.000	
32	Teko Listrik		1		350.000	
33	Tabung gas		1	Buah	750.000	
34	Dispenser		4	Unit	6.000.000	
35	Televisi		12	Buah	74.900.000	
36	Microphon		7	Buah	18.050.000	
37	Micropon table stand		32		183.990.000	
38	Lambang Garuda Pancasila		1		500.000	
39	Gambar Presiden/Wakil Presiden		4	Buah	1.600.000	
40	Tiang Bendera		52	Buah	21.143.000	
41	Tangga Aluminium		2	Buah	3.750.000	
42	Mimbar podium		1	Buah	5.225.000	
43	Alat RT lain2		1	Buah	54.462.000	
44	Tandon air		2		2.000.000	
45	Receiver+attachmen		3		4.600.000	
46	Alat Pemadam Porteble		5		4.841.000	
47	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran		11		13.750.000	

48	Internet		1		4.950.000	
49	PC unit/Komputer		20		187.950.000	
50	Laptop		22		218.600.000	
51	Monitor		7		12.490.000	
52	Printer		15		37.050.000	
53	Scanner		1		1.000.000	
54	Stabilizer/stavolt		8		5.350.000	
55	Meja Kerja Pejabat lain2		27		170.700.000	
56	Meja kerja		1		5.000.000	
57	Meja rapat ketua/Wakil ketua		2		1.800.000	
58	Meja rapat Esl II		5		4.275.000	
59	Meja rapat lain2		26		17.550.000	
60	Kursi Kerja ketua/wakil Ketua		4		6.000.000	
II I	Alat Studio dan Komunikasi					
1	Camera+Attachmen		6		167.600.000	
2	Proyektor+Atachm		2		97.500.000	
3	Power Suplay Micropon		1		16.000.000	
4	Peralatan studio visual lain2		7		10.200.000	
5	Handycam		1		4.800.000	
6	Layar Projector		3		76.450.000	
7	Camera electronic		3		9.100.000	
8	Sound system		5		297.200.000	
9	Hendy Talky		9		16.200.000	
10	Facsimile		2		3.900.000	
11	Alat komunikasi lain2		20		253.600.300	

IV	Alat Perlengkapan Keamanan					
1.	CCTV		16	Unit	71.260.000	
V	Alat –alat Besar					
1	Stasionary gerating Set		1	Unit	37.700.000	
VI	Alat-alat angkutan					
1	Sedan		1	Unit	49.000.000	
2	Station Wagon		14	Unit	3.772.860.000	
3	Minibus (penumpang 14 kebawah)		1	Unit	150.000.000	
4	Pinc Up		1	Unit	94.536.800	
5	Speda motor		17	Unit	255.893.750	
VII	Buku dan Perpustakaan					
1.	Encyclopedia,kamus,buku referensi		10		3.486.000	
2.	Buku umum lain2		8		494.000	
3.	Ekonomi		9		876.000	
4.	Hukum		933		91.272.525	
5.	Administrasi, Pertahanan dan Keamanan		2		264.000	
6.	Pendidikan		8	Buah	880.000	
7.	Umum		34	Unit	3.417.250	

VIII	Barang Bercorak Kebudayaan					
1	Lukisan lain-lain		1	Buah	216.830.000	

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kinerja pelayanan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan , administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, serta menjalankan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 (lima) tahun didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan pertumbuhan anggaran, namun ada juga beberapa program kegiatan yang mengalami penurunan dalam penganggaran dikarenakan harus menyesuaikan regulasi dan sumber daya aparatur yang ada, secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2

TABEL 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD
Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase penyelenggaraan rapat pembahasan perundang-undangan tepat waktu	0	0	0	100	100	100	100	100	9,4	93,8	96,8	205,0	33,3	9,4	93,8	96,8	205,0	33,3
2.	Persentase Pelaksanaan rapat-rapat Kelengkapan DPRD	0	0	0	100	100	100	100	100	53,9	66,2	81,8	90,8	100,0	53,9	66,2	81,8	90,8	100,0
3.	Persentasi Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	0	0	0	100	100	100	100	100	75,0	76,0	85,0	86,0	88,8	75,0	76,0	85,0	86,0	88,8
4.	Persentase Cakupan Reses dan Rapat Dengar Pendapat	0	0	0	100	100	100	100	100	10,0	24,0	50,0	49,0	100	10,0	24,0	50,0	49,0	100

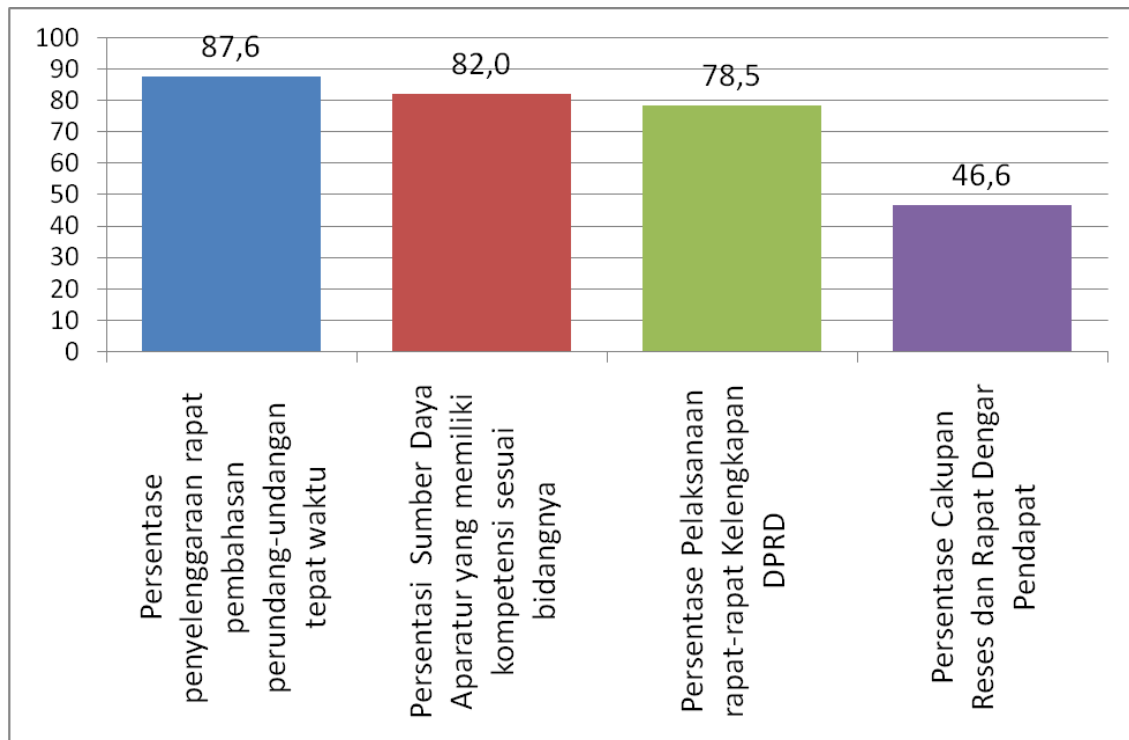
Tabel 2.2.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Kotawaringin Barat**

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun -					Realisasi Anggaran pada Tahun -					Rasio Realisasi Anggaran Tahun -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Angga ran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1 Belanja Tidak Langsung	2,461	2,472	2,468	2,693	3,075	2,136	2,177	2,290	2,559	2,874	86,82	88,07	92,81	95,00	93,48	2,634	2,407
2 Belanja Langsung																	
- Belanja Pegawai	0,100	0,146	0,146	0,230	0,343	0,099	0,140	0,137	0,214	0,330	99,03	95,67	94,29	92,93	96,21	0,193	0,184
- Belanja Barang/Jasa	4,451	4,623	6,199	4,901	6,036	2,388	3,943	4,519	4,123	5,297	52,59	85,29	72,89	84,13	87,76	5,260	4,054
- Belanja Modal	0,429	0,762	0,662	1,954	2,363	0,325	0,747	0,642	1,833	2,337	75,64	98,03	97,05	93,80	98,89	1,234	1,177

*) Anggaran Rp dalam Milyar

*) Rasio dalam % (Persentase)



Gambar 2.1. Grafik Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2012-2016

Pencapaian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat belum mencapai target yang diinginkan sebagaimana digambarkan pada grafik di atas Hal tersebut disebabkan antara lain :

1. Kegiatan Reses dan Rapat dengar Pendapat menempati urutan terakhir dari keempat Kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD yaitu sebesar 46,6% dari 100% yang ditargetkan selama lima tahun. Hal itu disebabkan sering berubahnya jadwal yang telah disepakati .
2. Kinerja Program peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pelayanan selama lima tahun rata-rata mencapai 82,0% dari 100% yang harus dicapai . Penyebabnya adalah Tingkat kemampuan keuangan daerah yang masih kurang sehingga kegiatan bimbingan teknis masih belum merata.
3. Prosentase kegiatan rapat kelengkapan dewan selama lima tahun rata-rata 78,5% dari 100% yang harus dicapai. Permasalahannya adalah masih adanya beberapa usulan kegiatan belum seluruhnya terakomodir.

4. Prosentase kegiatan rapat Pembahasan perundang-undangan tepat waktu selama lima tahun rata-rata 87,6% dari 100% yang harus dicapai .Permasalahannya adalah Masih sering terjadi kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Belum sesuai dengan jadwal yang sudah tersusun/ disepakati.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dalam pelayanan SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

1. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah
2. Tuntutan pelayanan yang prima dan kesejahteraan masyarakat
3. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara fluktuatif dan cepat
4. Adanya good governance dan era globalisasi

Peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

1. Adanya peraturan perundang – undangan sebagai acuan pelaksanaan tugas.
2. Adanya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten dan RPJM sebagai acuan program dan kegiatan.
3. Hubungan kerjasama yang baik antar instansi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , serta peran serta dan dukungan swasta masyarakat cukup tinggi.
4. Adanya kebijakan otonomi daerah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 44 tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kedudukan sebagai perangkat daerah yang merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan kewenangannya.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas pokok, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- d. Pembinaan administrasi dan sumber daya aparatur.
- e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka menjalankan tugas dan pelayanan kepada unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : Masih perlu peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur; dan ruang kerja guna kelancaran pelayanan dalam mengantisipasi bertambahnya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih pasca pemilu legislatif 2019.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bahwa Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebagaimana diketahui Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017–2022: “ ***Gerkan membangun Kotawaringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan Ikhlas*** “

Dimana Visi tersebut mempunyai makna sebagai berikut :

IKHLAS : I = IPTEK DAN INFRASTRUKTUR K = KETAKWAAN

H = HARMONIS L = LANGGENG A= AMAN S=SEJAHTERA

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral NURANI , yaitu : N= NASIONALIS U= UNGGUL R=RELIGIUS A= AMANAH N= NYATA I= INSPIRATIF

Selanjutnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Urusan Wajib Dan Pilihan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat supporting staf, yaitu dalam hal memberikan dukungan administrasi teknis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat atau dengan kata lain Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat bukan lembaga politik melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjalankan fungsi pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui visi misi tersebut , Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2017-2022 akan mendukung terwujudnya salah satu Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Secara Efektif, Efisien, Akuntabel, Demokratis dan Profesional

3.3 Telaahan Renstra K/I dan Renstra

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi sebagai penunjang Suporting Staf pada pelayanan administrasi dan pelayanan administrasi keuangan kepada Program/Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga tidak berkorelasi dengan Renstra Kementrian/Lembaga atau Renstra Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi sebagai penunjang Supporting Staf pada pelayanan administrasi dan pelayanan administrasi keuangan kepada Program/Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas melayani/memfasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disaat melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Kajian Rancangan Peraturan Daerah terhadap Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di wilayah Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.5 Penentuan isu - isu strategis

Dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka menjalankan tugas dan pelayanan kepada unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat maka ditetapkan isu - isu strategis SKPD sebagai berikut :

1. Mengantisipasi bertambahnya anggota legislatif pasca pemilu legislatif 2019, maka perlu penataan ruangan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlu dipersiapkannya ruangan bagi fraksi - fraksi, komisi-komisi dan badan - badan serta penambahan pegawai.

2. Sarana dan prasarana gedung berupa jaringan instalasi listrik yang dipandang sudah cukup lama dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan perlu perbaikan/rehab.
3. Guna kenyamanan kerja dengan keadaan ruangan yang terbatas maka perlu peningkatan sarana dan prasarana pembangunan gedung kantor sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Masih diperlukannya pendidikan politik pada masyarakat, terbukti bahwa dengan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/waki kota ,Legislatif);
5. Perlunya sarana dan prasarana media untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan maka tujuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

Memfasilitasi seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara efektif, efisien, akuntabel, demokratis dan profesional

Adapun sasaran yang diharapkan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

Terwujudnya pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

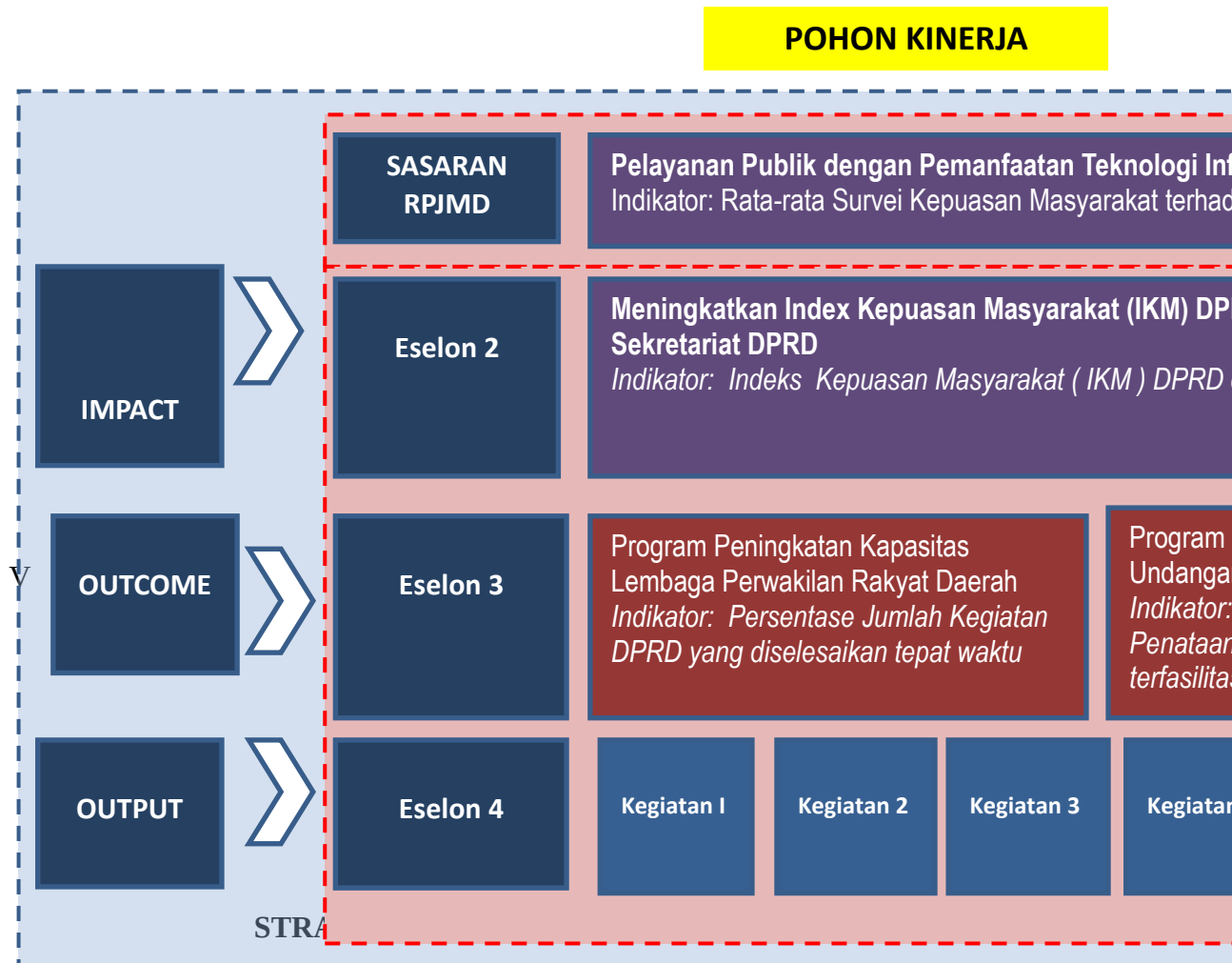
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Sasaran RPJMD	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target kinerja sasaran tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara efektif, efisien, akuntabel, demokratis dan profesional	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat	85	87	90	95	96	99

Sebagai upaya menunjukkan kerangka pembangunan, berikut merupakan pohon kinerja Sekretariat Dewan yang menggambarkan linieritas RPJMD Kota Waringin Barat dengan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)



5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD

Beberapa faktor lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah barang tentu merupakan potensi sekaligus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dalam upaya mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang dicermati dari sudut analisis SWOT, yang dapat diidentifikasi pada matrik berikut :



	Adanya komitmen pimpinan dan staf yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas	Motivasi kerja aparatur belum optimal
	Adanya perubahan tupoksi selaras dengan perubahan peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah	Data pendukung yang valid dan akurat kurang terinventarisir dengan baik
	Tersedianya tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kemampuan dan profesionalisme aparatur masih kurang dan belum merata
	Adanya kewajiban/kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Kurangnya kemauan untuk berkompetisi dalam pelaksanaan tugas
	Adanya kebijakan otonomi daerah	Koordinasi lintas instansi belum maksimal
Opportunity	S + O	W+O
Adanya peraturan perundang-undangan sebagai acuan pelaksanaan tugas	Optimalisasi pelaksanaan tugas koordinasi dan konsultasi untuk mengadopsi inovasi - inovasi baru.	Revitalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dewan, melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan
Adanya visi dan misi Bupati dan RPJMD sebagai acuan program dan kegiatan		
Threat	S+T	W+T
Terbatasnya kemampuan keuangan daerah	Melengkapi dan memperjelas klausul prosedur dan pedoman kerja Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Anggota Dewan	Sinergitas antar Tupoksi / <i>Stakeholder</i> yang terkait, sebagai upaya Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Tuntutan pelayanan yang prima dan kesejahteraan		
Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara fluktuatif dan cepat		

Berdasarkan matrix diatas berikut merupakan alternatif strategi yang dihasilkan melalui analisis SWOT:

1. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Koordinasi dan Konsultasi Untuk Mengadopsi Inovasi-Inovasi Baru
2. Revitalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dewan, melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan
3. Melengkapi dan Memperjelas Klausul Prosedur dan Pedoman Kerja Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Anggota Dewan
4. Sinergitas Antar Tupoksi / *Stakeholder* yang terkait, sebagai upaya Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Sebagai upaya memastikan semua alternatif strategi yang dipilih sesuai dengan pilihan program yang tersedia berikut dirumuskan pilihan strategi Sekretariat Dewan.

NO	PRESPEKTIF	ALTERNATIF STRATEGI	STRATEGI
1	Perspektif Masyarakat	Melengkapi dan memperjelas klausul prosedur dan pedoman kerja Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Anggota Dewan	Sinergitas dan Revitalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan, melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Anggota Dewan
2	Perspektif proses Internal	Optimalisasi pelaksanaan tugas koordinasi dan konsultasi untuk mengadopsi inovasi - inovasi baru	
3	Perspektif Kelembagaan	Revitalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan, melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan	
		Sinergitas antar Tupoksi / Stakeholder yang terkait, sebagai upaya Peningkatan Kualitas Kelembagaan	
4	Perspektif Keuangan		

Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran adalah :

1. Peningkatan kualitas kinerja aparatur yang selaras dengan tujuan pokok dan fungsi organisasi
2. Implementasi kaidah-kaidah sistem manajemen (planning, organizing, actuating dan controlling).
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas koordinasi dan konsultasi untuk mengadopsi inovasi - inovasi baru.
4. Melengkapi dan memperjelas klausul prosedur dan pedoman kerja.
5. Memperjelas hubungan dan tata kerja, prosedur administrasi, organisasi dan tatalaksana.
6. Peningkatan kualitas pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sarana dan prasarana.
7. Mengoptimalkan penataan dan administrasi kearsipan

Arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Sekredariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat telah merumuskan Tematik sebagai tersebut dibawah ini :

No	Arah Kebijakan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Peningkatan Kelembagaan Sekretariat Dewan						
2	Revitalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan						
Tematik Pembangunan OPD		Masa Transisi Kepala Daerah Baru	Transisi Diimplementasikan PP 18 Tahun 2017	Pemilihan dan Pelantikan Legislatif	Orientasi Terhadap Pemenuhan Fasilitasi Anggota Dewan	Peningkatan Pelayanan Anggota Dewan	Periode Akhir Renstra Sekwan Tahun 2017-2022

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun (2017 – 2022) dilaksanakan melalui program - program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, dan Kegiatan, serta Pendanaan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal perencanaan (2016)											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra (2022)		unit kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Misi ke 1 : Memperkuat tata Pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan transparan.																				
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntable	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	82%	82%	3.391.562.750	84%	3.281.170.000	86%	3.614.892.540	88%	3.577.547.114	90%	4.503.619.996	95%	4.614.664.407	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotawaringin Barat	
			40104.00.0.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	5 dokumen	25 dokumen	300.000	12 dokumen	300.000	12 dokumen	310.000	15 dokumen	315.000	15 dokumen	320.000	18 dokumen	325.000		
			40104.00.0.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 bulan	12 bulan	244.740.000	12 bulan	314.880.000	12 bulan	322.034.400	12 bulan	328.475.000	12 bulan	328.348.000	12 bulan	500.000.000		
			40104.00.0.01.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/ WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	60 orang	60 orang	198.090.000	30 orang	390.000.000	30 orang	390.000.000	30 orang	390.000.000	30 orang	390.000.000	30 orang	390.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)dan kegiatan (output)	data capaian pada awal perencanaan (2016)											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra (2022)		unit kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Misi ke 1 : Memperkuat tata Pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan transparan.																				
			40104.00.0.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	30 unit/Tahun	30 Unit/Tahun	22.745.000	25 Unit/Tahun	22.790.000	25 Unit/Tahun	23.929.500	25 Unit/Tahun	26.382.273	25 Unit/Tahun	27.701.386	25 Unit/Tahun	29.086.455		
			40104.00.0.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	832.519.000	12 bula	1.127.324.000	12 bulan	1.127.324.000	12 bulan	1.127.324.000	12 bulan	1.127.324.000	12 bulan	1.127.324.000		
			40104.00.0.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa Kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	213.382.300	12 bulan	209.600.000	12 bulan	218.102.262	12 bulan	224.645.330	12 bulan	224.674.300	12 bulan	224.684.500		
			40104.00.0.01.01.09	Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis Peralatan kerja yang diperbaiki	6 Unit/Tahun	6 Unit/Tahun	19.140.000	22 Unit/tahun	21.060.000	22 Unit/tahun	25.790.500	23 Unit/tahun	26.564.200	223Unit/tahun	26.541.700	25 Unit/tahun	27.361.200		
			40104.00.0.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang diperlukan	34 jenis	34 jenis	84.170.950	34 jenis	78.660.950	34 jenis	81.658.481	34 jenis	84.108.235	34 jenis	84.036.883	34 jenis	86.631.482		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)dan kegiatan (output)	data capaian pada awal perencanaan (2016)											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra (2022)		unit kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Misi ke 1 : Memperkuat tata Pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan transparan.																				
			40104.00.0.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	14 jenis	14 jenis	93.470.000	13 jenis	121.340.000	17 jenis	143.566.800	17 jenis	186.636.840	17 jenis	128.766.978	14 jenis	131.342.317		
			40104.00.0.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 jenis	6 jenis	26.890.500	5 jenis	25.408.200	6 jenis	26.678.610	6 jenis	28.012.540	8 jenis	29.413.167	8 jenis	30.883.825		
			40104.00.0.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 jenis	9 jenis	332.000.000	1 jenis	18.000.000	7 jenis	109.500.000	3 jenis	75.000.000	3 jenis	520.837.250	3 jenis	21.879.112		
			40104.00.0.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 jenis	22 jenis	31.000.000	-	-	22 jenis	155.000.000	23 jenis	60.000.000	23 jenis	65.000.000	22 jenis	45.266.100		
			40104.00.0.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	50 buku	40 buku	10.000.000	-	-	40 buku	13.225.000	40 buku	15.208.750	40 buku	17.490.063	40 buku	17.490.063		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)dan kegiatan (output)	data capaian pada awal perencanaan (2016)											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra (2022)		unit kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Misi ke 1 : Memperkuat tata Pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan transparan.																				
			40104.00.0.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman tamu	Waktu penyediaan makanan minuman bagi Rujab Ketua dan tamu	11795 OH	12636 OH	343.130.000	12 Bulan	270.806.850	12 Bulan	276.222.987	12 Bulan	281.747.446	12 Bulan	287.382.394	12 Bulan	293.495.093		
			40104.00.0.01.01.18	Rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD	59 Kali	102 Kali	692.000.000	57 Kali	411.000.000	57 Kali	431.550.000	60 Kali	453.127.500	65 Kali	975.783.875	75 Kali	504.330.907		
			40104.00.0.01.01.20	Penyediaan jasa publikasi surat kabar dan majalah	Jumlah media publikasi yang menyediakan jasa		6 media	220.000.000	7 media	270.000.000	7 media	270.000.000	7 media	270.000.000	7 media	270.000.000	7 media	270.000.000	Set DPRD	P Bun
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntable	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	83%	3.069.996.000	85%	380.650.000	87%	2.692.796.800	90%	2.036.515.716	92%	5.750.867.160	95%	2.385.472.463	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kotawaringin Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)dan kegiatan (output)	data capaian pada awal perencanaan (2016)											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra (2022)		unit kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Misi ke 1 : Memperkuat tata Pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan transparan.																				
			40104.00.0.02.02.02	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun										1 unit	500.000.000				
			40104.00.0.02.02.03	Pembangunan gedung Kantor	Jumlah gedung Kantor yang dibangun	2 Unit	9 Unit	820.450.000	-	-	1 Unit	75.000.000	1 Unit	204.000.000	1 Unit	708.080.000	1 Unit	1.000.000.000		
			40104.00.0.02.02.04	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil Jabatan yang diadakan	-	-	-	-	-	3 unit	1.900.000.000	-		-	-	-	-		
			40104.00.0.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	9 jenis	20 jenis	843.518.000	3 jenis	49.500.000	6 jenis	56.925.000	2 jenis	57.000.000	10 jenis	75.283.312	12 jenis	86.575.808		
			40104.00.0.02.02.11	Pemeliharaan Rutin/Bekala rumah jabatan	Jumlah Luasan rumah jabatan yang dipelihara Rutin/Berkala	310 M2	257 M2	27.058.000	160 M2	14.060.000	160 M2	15.466.000	175 M2	17.012.600	175 M2	18.713.860	200 M2	20.585.246		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)dan kegiatan (output)	data capaian pada awal perencanaan (2016)											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra (2022)		unit kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Misi ke 1 : Memperkuat tata Pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan transparan.																				
			40104.00.0.02.02.13	Pemelihaaan Rutin/Bekala gedung kantor	Jumlah luasan gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	392 M2	745 M2	99.830.000	10000 M2	110.000.000	10000 M2	121.000.000	11000 M2	133.100.000	11000 M2	146.410.000	11500 M2	161.051.000		
			40104.00.0.0.2.02.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	3 Unit	3 Unit	112.500.000	3 Unit	28.500.000	3 Unit	31.350.000	3 Unit	34.485.000	3 Unit	37.933.500	3 Unit	41.726.850		
			40104.00.0.02.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	28 Unit	28 Unit	424.000.000	22 Unit	154.800.000	22 Unit	162.540.000	22 Unit	170.667.000	22 Unit	179.200.350	22 Unit	188.160.367		
			40104.00.0.02.02.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kntor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 jenis	2 jenis	32.940.000	2 jenis	23.790.000	2 jenis	24.265.800	2 jenis	24.751.116	2 jenis	25.246.138	2 jenis	25.751.060		
			40104.00.0.0.2.02.17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kntor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara						45 Unit	27.500.000	45 Unit	28.500.000						
			40104.00.0.02.02.09	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan Gedung Kantor yang diadakan						3 jenis	278.750.000	3 jenis	817.000.000	2 jenis	60.000.0000	3 jenis	65.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal perencanaan (2016)											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra (2022)		unit kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Misi ke 1 : Memperkuat tata Pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan transparan.																				
			40104.00.0.0.2.02.10	Pengadaan meubeleur	Jumlah jenis meubeleur yang diadakan								2 jenis	50.000.000			2 jenis	80.000.000		
			40104.00.0.02.02.2.3	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Jumlah atau luasan gedung kantor yang di rehabilitasi sedang/berat	1 unit	1 unit	709.700.000	-	-	-	-	1 unit	500.000.000	1 Unit	4.000.000.000	-	-		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	85 %	222.470.000	88%	222.930.000	90%	243.644.600	92%	231.183.492	95%	226.798.161	98%	239.815.124	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pangkalan Bun
			40104.00.0.03.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi yang diadakan	-	-	-	1 unit	7.500.000	1 unit	8.000.000	1 unit	8.250.000	-	-	1 unit	9.075.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada awal perencanaan (2016)											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra (2022)		unit kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Misi ke 1 : Memperkuat tata Pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan transparan.																				
			40104.00.0.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	166 stel	173 stel	184.520.000	178 stel	185.730.000	178 stel	189.444.600	178 stel	193.233.492	178 stel	197.098.161	178 stel	201.040.124		
			40104.00.0.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	-	69 stel	37.950.000	54 stel	29.700.000	84 stel	46.200.000	54 stel	29.700.000	54 stel	29.700.000	54 stel	29.700.000		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntable	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase pemenuhan Layanan Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS						85 %	15.000.000			87 %	13.000.000	89 %	15.000.000		
			40104.00.0.04.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan						1 orang	15.000.000			1 orang	13.000.000	1 orang	15.000.000		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntable	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	80%	288.000.000	83%	304.000.000	86%	310.080.000	89%	316.281.600	92%	322.607.232	95%	329.059.376	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)dan kegiatan (output)	data capaian pada awal perencanaan (2016)											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra (2022)		unit kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Misi ke 1 : Memperkuat tata Pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan transparan.																				
			40104.00.0.05.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	26 Orang	32 orang	288.000.000	32 orang	304.000.000	32 orang	310.080.000	32 orang	316.281.600	32 orang	322.607.232	70 orang	329.059.376		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntable	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				87%	56.000.000	88%	69.600.000	89%	76.760.000	90%	83.536.000	95	90.989.600	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pangkalan Bun
			40104.00.0.06.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersusun	-	-	-	-	-	1 Lap	5.000.000	1 Lap	5.000.000	1 Lap	5.000.000	1 Lap	5.000.000		
			40104.00.0.06.0.6.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan keuangan permester	-	-	-	-	-	1 Lap	3.000.000	1 Lap	4.000.000	1 Lap	4.000.000	1 Lap	4.000.000		
			40104.00.0.0.6.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	1 lap	56.000.000	1 lap	61.600.000	1 lap	67.760.000	1 lap	74.536.000	1 lap	81.989.600		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)dan kegiatan (output)	data capaian pada awal perencanaan (2016)											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra (2022)		unit kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Misi ke 1 : Memperkuat tata Pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan transparan.																				
Meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif, efisien, akuntable, demokratis dan profesional	Meningkatnya index Kepuasan Masyarakat/ DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Index Kepuasan Masyarakat dengan mutu sangat baik		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Jumlah kegiatan DPRD yang diselesaikan tepat waktu	100%	90%	5.738.164.250	92%	3.734.900.000	94%	4.574.182.705	96%	7.040.851.396	98%	4.487.469.801	100%	9.867.252.576		
			40104.40.1.24.24.01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diadakan	92 kali	25 kali	303.500.000	25 kali	444.900.000	25 kali	444.900.000	25 kali	444.900.000	25 kali	444.900.000	25 kali	444.900.000		
			40104.40.1.24.24.02	Hearing /Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Agama	Jumlah rapat Hearing /Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Agama yang diadakan	29 kali	12 kali	40.000.000	20 kali	50.000.000	20 kali	51.000.000	20 kali	52.020.000	20 kali	53.060.000	20 kali	54.121.208		
			40104.40.1.24.24.03	Rapat - rapat Kelengkapan Daerah	Jumlah Rapat - rapat Kelengkapan Daerah yang diadakan	109 kali	85 kali	223.400.000	75 kali	258.400.000	75 kali	263.568.000	75 kali	268.839.360	75 kali	274.216.147	75 kali	279.700.469		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)dan kegiatan (output)	data capaian pada awal perencanaan (2016)											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra (2022)		unit kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Misi ke 1 : Memperkuat tata Pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan transparan.																				
			40104.40.1.24.24.04	Rapat - Rapat Paripurna	Jumlah Rapat - Rapat Paripurna yang diadakan	25 kali	40 kali	277.000.000	41 kali	186.000.000	41 kali	189.720.000	41 kali	193.514.400	41 kali	197.384.688	41 kali	201.332.381		
			40104.40.1.24.24.05	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan Reses yang diadakan	2 kali reses	2 kali reses	214.117.200	3 kali reses	365.250.000	3 kali reses	365.250.000	3 kali reses	365.250.000	3 kali reses	365.250.000	3 kali reses K	365.250.000		
			40104.40.1.24.24.06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja/monitoring/undangan dalam kota/luar kota	120 OK	120 OK	315.447.050	120 OK	224.350.000	120 OK	239.037.000	120 OK	243.817.740	120 OK	248.694.094	120 OK	253.667.975		
			40104.40.1.24.24.07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Kunker/studi banding, konsultasi/koordinasi/undangan, bimtek/pelatihan/sosialisasi/workshop) Pimpinan dan Anggota DPRD	220 OK	390 OK	4.194.600.000	192 OK	2.196.000.000	270 OK	2.858.607.705	300 OK	5.332.209.896	360 OK	2.763.664.872	360 OK	2.386.020.255		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)dan kegiatan (output)	data capaian pada awal perencanaan (2016)											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra (2022)		unit kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Misi ke 1 : Memperkuat tata Pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan transparan.																				
			40104.40.1.2 4.24.08	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan yang dilaksanakan	-	6 Kali	170.100.000	-	-	6 Kali	170.100.000	6 Kali	140.300.000	6 Kali	140.300.000	6 Kali	140.300.000		
Meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif, efisien, akuntable, demokratis dan profesional	Meningkatnya index Kepuasan Masyarakat/ DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Index Kepuasan Masyarakat dengan mutu sangat baik		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Jumlah kegiatan Penatan Peraturan Perundangan yang terfasilitasi Tepat Waktu	0%	75%	162.200.000	80%	237.500.000	85%	261.250.000	90%	287.375.000	95%	816.112.500	100%	347.723.750		
			40104.40.1.24.24.01	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Perda Inisiatif yang dilegislati dan Terfasilitasi tepat waktu		1 Naskah Akademik	162.200.000	1 Naskah Akademik	237.500.000	1 Naskah Akademik	261.250.000	1 Naskah Akademik	287.375.000	1 Naskah Akademik	816.112.500	1 Naskah Akademik	347.723.750		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka memberikan pelayanan administrasi dan administrasi keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan target 5 (lima) tahun kedepan sebagai upaya untuk mencapai target capaian Indikator yang diawali dengan kondisi kinerja awal periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016, dan berakhir dengan kondisi kinerja pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 yang mendukung misi ke-2 Kepala Daerah Kabupaten Malang yaitu : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dapat ditampilkan pada Tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2016)	Target capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2022)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD dengan Mutu Sangat Baik	0	85	87	90	95	96	99

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dengan memperhitungkan potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah diperlukan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi.

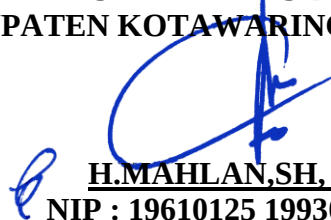
Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana didalamnya memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat setelah disahkan Bupati Kotawaringin Barat akan ditetapkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dapat dilaksanakan.

Demikian untuk dilaksanakan.

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



H. MAHLAN, SH, M.Si
NIP : 19610125 199303 1 004